

**RENJA 2018**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2018**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka menetapkan arah dan acuan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jambi dan menindaklanjuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka disusun Rencana Kerja (Renja) **Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018** yang berisikan tentang evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta sumber dana yang dibutuhkan. Pelaksanaannya dirancang selama 1 (satu) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi diakhir tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan, yang mencakup tiga kegiatan utama yaitu (1) Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; (2) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan; serta (3) Pengembangan Pengankaraman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan tersebut, Koordinasi Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan dilaksanakan dengan mengoptimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan.

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan dalam upaya pencapaian Ketahanan Pangan yang mantap dan berkelanjutan.

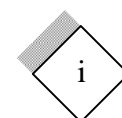
Jambi,     Maret 2017

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Jambi,

**Ir. Hj. SRI ARGUNAINI, M.Si.**

Pembina Tingkat I / IV. B

NIP.19660722 199303 2 004



DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... li

**I PENDAHULUAN ..... 1**

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum ..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 4

**II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN ..... 5**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi..... 5

A Program/Kegiatan yang Dibiayai APBD Provinsi Jambi..... 5

B Program/Kegiatan Yang Dibiayai Dana Dekonsentrasi..... 6

C Hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan ..... 8

**III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..... 34**

**IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD..... 37**

**V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF..... 39**

**VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ..... 40**

**VII PENUTUP ..... 41**

LAMPIRAN ..... 42

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang.

Rencana kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini rencana kerja pembangunan ketahanan pangan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Mengacu kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 bahwa ketahanan pangan merupakan prioritas misi kedua dan misi keempat prioritas pembangunan dalam mewujudkan ***Jambi Tertib, Unggul Nyaman Tangguh, Adil dan Sejahtera (Jambi Tuntas 2021)***.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012). Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan nasional, penentu kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan dimasa depan.

Jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi di Provinsi Jambi, masih adanya kasus-kasus kerawanan pangan di tengah-tengah masyarakat, terjadinya bencana alam yang merusak sumberdaya alam, perubahan iklim yang sulit diprediksi, munculnya krisis energi, alih fungsi lahan potensial tanaman pangan ke pemukiman dan tanaman industri merupakan masalah yang harus dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Pangan selain merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan hak azasi manusia yang harus dipenuhi juga merupakan komoditas strategis yang dapat menentukan arah politik pemerintah. Lemahnya ketahanan pangan pada suatu wilayah mencerminkan peringkat kerawanan pangan dan tingkat kemiskinan masyarakat yang bermuara pada rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas nasional yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta percepatan panganekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial-ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan; pemantapan distribusi dan cadangan pangan; serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat untuk mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan nasional sebagai produsen, konsumen, dan perdagangan; sedangkan pemerintah sebagai *supporting system* dalam pengaturan, fasilitasi, memotivasi, dan regulasi untuk mendukung kegiatan masyarakat secara konstruktif dan produktif.

Berkenaan dengan hal tersebut, sebagai salah satu bentuk peran dari Pemerintah Provinsi Jambi, maka disusunlah **Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi** yang akan diuraikan pada bab-bab selanjutnya.

## **1.2. Landasan Hukum.**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 8 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Provinsi Jambi.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan lainnya yang menjadi landasan hukum :

- (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- (b) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- (c) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005 – 2025);
- (e) Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2, bahwa Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib mempertanggung jawabkan urusan ketahanan pangan;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 7 ayat 2, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (j) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2016 - 2021.
- (k) Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

### **1.3. Maksud dan Tujuan.**

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi merupakan instansi yang masih berperan melaksanakan koordinasi dan teknis dengan instansi terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Adapun tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018 adalah :

- a. Meningkatkan pengkajian dan perumusan serta pengembangan dan pemantauan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan ketahanan pangan;
- c. Meningkatkan pembinaan pemantapan kelembagaan ketahanan pangan;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai kemandirian pangan;
- e. Mewujudkan pelayanan prima dalam mendukung kegiatan ketahanan pangan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN;

BAB II EVALUASI PEAKSANAAN RENJA TAHUN 2016;

BAB III TUJUAN, SASARAN;

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN;  
a. Indikator Kinerja.  
b. Kelompok Sasaran.  
c. Lokasi Kegiatan.  
d. Kebutuhan Dana Indikatif; dan  
e. Sumber Dana.

BAB V PENUTUP

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KETAHANAN  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra Badan  
Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

Selama tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah melaksanakan Program dan kegiatan baik yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jambi maupun dana Dekonsentrasi dari Dinas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, yang mana alokasi dan realisasi anggaran dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Program/Kegiatan Yang Dibiayai APBD Provinsi Jambi.

Program/Kegiatan pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada Tahun 2016, tergabung ke dalam 5 Program, dan masing-masing Program mempunyai beberapa kegiatan. Alokasi dan realisasi anggaran per program/kegiatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. REALISASI SERAPAN APBD BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAMBI TA. 2016

No	Uraian Kegiatan	Total Dana Dalam DPA (Rp.)	Realisasi Serapan (Rp.)	Persentase Serapan (%)
1	2	3	4	5
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1	Keg. Penyusunan Jasa Surat Menyurat	112.380.000	112.380.000	100,00
2	Keg. Penyusunan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	116.400.000	88.148.849	75,73
3	Keg. Penyusunan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.433.130	2.433.130	100,00
4	Keg. Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan	114.302.000	114.202.000	99,91
5	Keg. Penyusunan Jasa Alat Tulis Kantor	29.272.110	29.272.110	100,00
6	Keg. Penyusunan Barang Cetakan dan Panggandaan	24.998.100	24.998.100	100,00
7	Keg. Penyus. Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00
8	Keg. Penyusunan Bahan Bacaan & Perundangan	34.680.000	34.680.000	100,00
9	Keg. Penyusunan Makanan & Minuman	45.180.000	45.177.700	99,99
10	Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	125.429.160	122.773.272	97,88
	Jumlah	606.574.500	575.565.161	94,89
02	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur			
1	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	136.720.000	136.617.250	99,92
2	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kend. Dinas / Operasional	162.876.000	161.833.501	99,36
3	Keg. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00
	Jumlah	317.596.000	316.450.751	99,64
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1	Keg. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	41.600.000	41.584.400	99,96
	Jumlah	41.600.000	41.584.400	99,96
04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
1	Keg. Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.250.000	19.150.000	94,57
	Jumlah	20.250.000	19.150.000	94,57
05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1	Keg. Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	156.475.000	156.318.800	99,90
2	Keg. Pemantauan & Analisis Akses Pangan Masyarakat	177.370.800	141.061.922	79,53
3	Keg. Peningkatan Mutu & Keamanan Pangan	147.175.000	145.750.000	99,03
4	Keg. Pengembangan Lumbung Pangan Desa	183.055.000	181.039.250	98,90
5	Keg. Penyusunan Database Statistik Ketahanan Pangan	47.150.000	47.145.950	99,99
6	Keg. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	212.729.000	188.985.100	88,84
7	Keg. Pameran Ketahanan Pangan Tk. Nasional & Provinsi	216.150.000	186.444.305	86,26
8	Keg. Analisis Ketersediaan Pangan	92.600.000	92.474.000	99,86
9	Keg. Pengembangan dan Pemantapan Desa Mandiri Pangan	72.855.000	72.610.900	99,66
10	Keg. Monitoring & Evaluasi Ketahanan Pangan	48.954.000	48.940.650	99,97
11	Keg. Koordinasi Perencanaan & Perumusan Program KP	141.888.000	141.218.750	99,53
12	Keg. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	100.886.050	48.140.000	47,72
13	Keg. Pemantauan & Analisis Harga Pangan Pokok	112.500.000	109.130.200	97,00
14	Keg. Pemb. Masy.dlm Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	295.934.750	280.355.950	94,74
15	Keg. Partisipasi Masy. dalam Pengembangan KP (Lomba KP)	82.550.000	61.426.000	74,41
16	Keg. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	108.930.000	108.485.000	99,59
17	Keg. Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	96.064.200	89.638.090	93,31
18	Keg. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	48.165.000	47.190.000	97,98
19	Keg. Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien	57.050.000	48.576.200	85,15
20	Keg. Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	48.150.000	39.739.700	82,53
21	Keg. Koordinasi Kebijakan Perberasan	34.850.000	31.374.457	90,03
22	Keg. Stabilitas Kepastian Harga Kualitas Primer (P-LDPM)	310.025.700	234.353.528	75,59
	Jumlah	2.791.507.500	2.500.398.752	89,57
	TOTAL	3.777.528.000	3.453.149.064	91,41



Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat bahwa dari dana sebesar Rp. 3.777.528.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 3.453.149.064,- atau sebesar 91,41%.

**B. Program/Kegiatan Yang Dibayai Dana Dekonsentrasi**

Dana Dekonsentrasi yang diterima Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi TA. 2016 dialokasikan untuk Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan 8 (delapan) instansi di kabupaten/kota yang mana alokasi dan realisasi anggaran masing-masing sebagaimana tabel 2 berikut:

**Tabel 2 : Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2016 per 31 Desember 2016 dirinci per Prov/Kab/Kota.**

No.	Instansi/Prov/Kab/Kota	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1.	Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi	4,834,574,000	4,418,437,735	91.39
2.	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tebo	169,020,000	140,969,800	83.40
3.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Batang Hari	170,900,000	167,420,000	97.96
4.	Badan Pelaksanan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh.	246,225,000	215,615,000	87.57
5.	Kantor Ketahanan Pangan Kab Tanjab Barat.	388,570,000	308,044,000	79.28
6.	Badan Ketahanan Pangan Kab Kerinci.	245,020,000	230,693,125	94.15
7.	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kab. Muaro Jambi	243,590,000	210,635,000	86.47
8.	Kantor Ketahanan Pangan Kab Bungo.	251,350,000	222,154,300	88.38
9.	Kantor Ketahanan Pangan Kab Tanjab Timur.	389,520,000	280,994,000	72.14
	<b>Jumlah</b>	<b>6,938,769,000</b>	<b>6,194,962,960</b>	<b>89.28</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah anggaran dana dekonsentrasi TA. 2016 yang diterima oleh Satker Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebesar **Rp. 6.938.769.000** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 6.149.962.960,-** atau sebesar **89,28 %**.

Adapun program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana Dekonsentrasi TA. 2016 sebagaimana tabel 3 berikut :

Tabel 3. Realisasi Serapan Anggaran Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi				
Per 31 Desember 2016				
No./Kode	PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	(%)
1	2	3	4	5
018.11.14	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	6.938.769.000	6.194.962.960	89,28
1814	Pengembangan Sistim Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	3.194.431.000	2.981.728.238	93,34
101	Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	676.260.000	647.079.100	95,68
103	Panel Harga Pangan Nasional dan Pemantauan Harga dan Pasokan HBKN	274.500.000	234.486.800	85,42
105	Toko Tani Indonesia	2.243.671.000	2.100.162.338	93,60
1815	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	788.253.000	643.781.800	81,67
102	Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan	60.000.000	55.718.700	92,86
103	Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	175.000.000	163.940.100	93,68
106	Kawasan Mandiri Pangan	440.000.000	324.078.000	73,65
107	Pemantauan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	113.253.000	100.045.000	88,34
1816	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	2.207.555.000	1.864.171.997	84,45
101	Pemberdayaan Pekarangan Pangan	1.390.040.000	1.230.304.300	88,51
102	Pemantauan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	120.000.000	118.632.897	98,86
103	Gerakan Diversifikasi Pangan	90.000.000	85.622.400	95,14
104	Hasil Analisis Pola dan Kebutuhan Konsumsi Pangan	75.000.000	70.766.500	94,36
106	Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	532.515.000	358.845.900	67,39
1817	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan	748.530.000	705.280.925	94,22
101	Penyusunan Rencana Program, Anggaran dan Kerjasama	152.380.000	149.652.600	98,21
102	Pemantauan dan Evaluasi Program.	162.710.000	155.298.500	95,44
104	Keuangan dan Perlengkapan	149.910.000	148.893.200	99,32
106	Manajemen dan Administrasi Kelembagaan KP Daerah	283.530.000	251.436.625	88,68
	JUMLAH TOTAL	6.938.769.000	6.194.962.960	89,28

C. Hasil-hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun secara ringkas dapat disampaikan beberapa hasil yang telah dicapai selama beberapa tahun, sebagai mana terurai berikut ini :

1). Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, hasil yang telah dicapai antara lain :

a. Ketersediaan Energi Tahun 2010 - 2016.

Ketersediaan energi yang harus dicapai setiap tahun yakni minimal 2.400 kkal/kap/hari, sedangkan ketersediaan protein minimal 65 gram/kap/hari. Adapun hasil yang telah dicapai dapat dilihat pada table 4 berikut :

Tabel 4. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita di Provinsi Jambi Tahun 2009-2016

No	Tahun	Energi Per Kapita (Kkal/kap/hari)	Protein Per Kapita (gram/kapita/hari)
1	2009	3,527	82,19
2	2010	3,224	75,28
3	2011	3,409	78,35
4	2012	3,113	70,51
5	2013	3,186	75,23
6	2014	3,217	75,59
7	2015	3,204	69,46
8	2016	2,854	64,86

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi , 2016.

Berdasarkan table 4 diatas, terlihat bahwa baik ketersediaan energi maupun ketersediaan protein, telah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

b. Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi.

Pengertian ketersediaan pangan dalam bahasan ini adalah ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat yang berasal dari produksi lokal yang merupakan selisih dari produksi daerah dikurangi dengan kebutuhan benih (khusus padi dan palawija), tercecer, penggunaan untuk bahan baku industri non pangan dan makanan ternak (pakan) dan telah dikonversi menjadi bahan konsumsi.

Ketersediaan bahan pangan dari kemampuan produksi daerah dan kebutuhan konsumsi penduduk Tahun 2015 (Angka Tetap) dan Angka Ramalan II Tahun 2016 pada beberapa komoditi strategis bila dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan PPH, secara rinci dapat dilihat pada tabel Ketersediaan Pangan dari Kemampuan Produksi Daerah, seperti yang ditampilkan pada Tabel 5.

**Tabel 5 : Kondisi Ketersediaan dari Kemampuan Produksi Tahun 2015 (ATAP) dan Tahun 2016 (ARAM II), Jumlah Konsumsi Penduduk dan Kebutuhan Berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH).**

No	Komoditas	2015				2016*			
		Keterse diaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdasarkan PPH		Ketersediaan	Konsumsi Penduduk	Kebutuhan Berdasarkan PPH	
				Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi			Tingkat Ketersediaan	Tingkat Konsumsi
1	Padi	304.442	318.096	348.723	312.389	452.879	323.410	354.553	317.620
2	Jagung	45.769	1.021	955	856	98.434	1.038	971	870
3	Kedelai	6.172	15.990	36.666	32.846	15.113	16.257	37.279	33.396
4	K. Tanah	1.007	340	1.030	923	1.828	346	1.047	938
5	K. Hijau	119	340	1.381	1.237	343	346	1.404	1.257
6	Ubi Kayu	41.640	17.691	102.451	91.779	54.056	17.986	104.164	93.314
7	Ubi Jalar	69.866	5.443	25.949	23.246	77.300	5.534	26.382	23.634
8	Daging								
	Ruminansia	7.942	3.742	6.550	5.868	74.961	3.805	6.660	5.966
	Unggas	22.366	26.786	36.480	32.680	51.628	27.326	37.089	33.226
9	Telur	18.301	25.856	39.846	35.696	19.578	6.280	40.512	36.292
10	Ikan	93.897	83.692	137.546	123.129	105.681	85.090	139.846	126.278

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 ketersediaan bahan pangan pada beberapa komoditas seperti jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar, daging ruminansia serta ikan telah mencukupi kebutuhan penduduk. Namun demikian komoditi padi/beras kedelei, kacang hijau, daging unggas dan telur masih belum terpenuhi. Kebutuhan ikan yang secara konsumsi telah memenuhi kebutuhan namun bila mengacu pada pola pangan harapan (PPH) ketersediaan ikan masih belum mencukupi.

c. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Cadangan pangan pemerintah daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Pergub nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Pergub No.12 Tahun 2013 tersebut, untuk tahun 2013 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia di Badan Ketahanan Pangan sebesar 70 ton bekerjasama dengan Perum Bulog pengelolaannya dikelola oleh Perum Bulog, untuk tahun 2014 telah dilaksanakan penambahan cadangan pangan sebanyak 20 ton, sehingga total cadangan pangan pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2014 ini menjadi 90 ton.

Dari total cadangan pemerintah daerah tersebut telah digunakan sebanyak **32.102,5 kg** beras untuk membantu masyarakat rawan pangan/bencana alam di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjab Barat, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin sehingga stok Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi di Gudang Perum Bulog per 31 Desember 2016 adalah sebesar **57.897,5 kg** beras.

Sementara jumlah Cadangan Pangan yang tersedia pada Perum Bulog Divre/sub Divre Jambi kondisi Januari s/d bulan Desember 2016 seperti disajikan pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Kondisi Cadangan Pangan Beras (Stok yang dikuasai) Perum Bulog Divre /Sub Divre se- Jambi Bulan Januari s/d Desember 2016.

No	Bulan	Stock Dikuasai (Kg)
1.	Januari	9.878.477,97
2.	Pebruari	8.162.904,00
3.	Maret	8.334.790,00
4.	April	8.462.231,00
5.	Mei	13.016.203,00
6.	Juni	13.141.893,00
7.	Juli	13.219.758,00
8.	Agustus	11.289.303,00
9	September	10.503.496,00
10	Oktober	10.501.735,00
11	November	9.602.063,00
12	Desember	11.684.413,00

Sumber : Perum Bulog Provinsi Jambi

d. **Pengembangan Lumbung Pangan.**

Dalam upaya meningkatkan cadangan pangan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi telah merevitalisasi lumbung-lumbung pangan penduduk yang berada di pedesaan. Pemberdayaan Lumbung Pangan telah dilaksanakan terhadap 55 (Lima Puluh Lima) kelompok yang terdiri dari 36 (Tiga Puluh Enam) kelompok Tahap Pasca Kemandirian, dan 19 (Sembilan Belas) kelompok Lumbung Pangan Tahap Pengembangan yang berada pada 10 (Sepuluh) kabupaten/kota. Kelompok Tahap Pasca Kemandirian Pembinaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Adapun nama dan lokasi kelompok Lumbung Pangan Tahap Pengembangan pada saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Daftar Kelompok Lumbung Pangan Tahap Pengembangan.

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Ketua
1	Kerinci	Kayu Aro	Sungai Sampun	Jaya Bersama	Dinal ABRI
		Siulak Deras	Siulak Deras Mudik	Guguk Indah II	Hamsinah
		Siulak Mukai	Mukai Seberang	Sejati Sejahtera	Syafrinal
		Air Hangat Barat	Hamparan Pugu	Kerjasama	Amir Yunus
		Air Hangat Timur	Air Hangat	Harapan Jaya	Wirna, S.Pdi
		Sitinjau Laut	Penawar Tinggi	Usaha Baru	M. Nursi
		Keliling Danau	Keluru	Rawit Putih	Yuslina
		Air Hangat	Majidin Mudik	Damai	Anural Wadi
2	Bungo	Batang Merangin	Pematang Lingkung	Usaha Muda	Priadoni
		Tanah Sepenggal	Sungai Gambir	Pasar Teluk	Taufik
		Jujuhan Ilir	Bukit Sari	Dewi Sri	Kadam
		Pelapat	Balai Jaya	Maju Jaya	Mahyudin
		Batin II Ulu	Sei Telang	Mekar Jaya	Muklis
3	Tebo	Tebo Ilir	Tuo Ilir	Sinar Pagi I	Helmi Iwan
		Tebo Ilir	Kel. Sei Bengkal	Tani Sei Samak II	Maryadi
4	Sarolangun	Sarolangun	Sarolangun Kembang	Selang Rengas	Suherman
5	Batanghari	Maro Sebo Ulu	Teluk Leban	Makmur	Samsuri
		Mersam	Mersam	Terpadu	Azmi
		Muaro Tembesi	Rantau Kapas Tuo	Rizki Bersama	Sofyan

Dengan adanya Moratorium Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan di Pusat, maka kelompok Tahap Pengembangan tersebut belum ditingkatkan ke Tahap Kemandirian. Pada saat ini kondisi Cadangan Pangan di Kelompok Lumbung secara keseluruhan diperkirakan sebanyak 8.656 kg beras dan 24.104 kg beras.

d. **Pengembangan Desa Mandiri Pangan.**

Penanggulangan Kerawanan Pangan di Provinsi Jambi dilaksanakan melalui Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Provinsi Jambi telah dimulai pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012. Jumlah kelompok yang telah diberdayakan berjumlah 354 (Tiga Ratus Lima Puluh Empat) kelompok dengan jumlah KK miskin 8.111 KK di 87 (Delapan Puluh Tujuh) Desa yang tersebar pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota, namun sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini tidak ada penambahan Desa Mandiri Pangan baru tetapi kegiatan tersebut hanya bersifat/Berupa pembinaan terhadap desa mandiri pangan yang telah ada. Untuk itu sangat diharapkan agar kabupaten/kota dapat mengalokasikan dana untuk desa mandiri pangan baru dalam rangka penanganan daerah rawan pangan melalui dana APBD II.

Perkembangan pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

**Tabel 8 : Perkembangan Program Aksi Desa Mandiri Pangan Dari Tahun 2006 Sampai Dengan Tahun 2016**

No	Kabupaten/Kota	Jml Desa	Jml Klpg	KK Miskin		Bansos PMUK (Rp.)
				Jumlah	Diberdayakan	
1.	Sungai Penuh	5	13	531	374	300.000.000
2.	Kerinci	7	26	986	316	600.000.000
3.	Merangin	7	20	793	509	850.000.000
4.	Sarolangun	9	32	922	490	850.000.000
5.	Bungo	7	33	1.182	530	850.000.000
6.	Tebo	7	15	569	341	850.000.000
7.	Batanghari	10	33	1.691	1.191	500.000.000
8.	Muara Jambi	7	35	1.473	763	850.000.000
9.	Tanjab Barat	8	81	2.493	1.699	750.000.000
10.	Tanjab Timur	12	33	2.638	810	600.000.000
11.	Kota Jambi	8	33	3.426	1.088	400.000.000
	Jumlah	87	354	16.704	8.111	7.400.000.000

Kegiatan pengembangan Desa Mandiri Pangan di Tingkat Pusat sejak Tahun 2013 tidak dianggarkan lagi untuk pembentukan desa baru, namun mengingat Desa Mandiri Pangan ini merupakan salah satu Program Aksi Badan Ketahanan Pangan, maka dukungan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan untuk mendukung Pembinaan

Desa Mandiri Pangan yang lama atau jika memungkinkan dibentuk Desa Mandiri Pangan Baru melalui dana APBD Kabupaten/Kota.

Sejak tahun 2015 melalui dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI telah mengalokasikan anggaran untuk pembentukan 2 (dua) Kawasan Mandiri Pangan Tahap Persiapan, dan pada Tahun 2016 ini memasuki Tahap Penumbuhan dan menerima Bantuan Pemerintah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- dan telah dicairkan pada tanggal 26 Oktober 2016, adapun kedua Kawasan Mandiri Pangan tersebut yakni :

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 (satu) kawasan, yaitu di Kecamatan Betara, terdiri atas 5 (lima) desa sebagai berikut :
  - 1). Kelurahan Mekar Jaya.
  - 2). Desa Mandala Jaya
  - 3). Desa Makmur Jaya
  - 4). Desa Bunga Tanjung
  - 5). Desa Terjun Gajah
2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 (satu) kawasan, yaitu di Kecamatan Berbak, terdiri atas 5 (lima) desa sebagai berikut:
  - 1). Kelurahan Simpang
  - 2). Desa Rantau Makmur
  - 3). Desa Telago Limo
  - 4). Desa Rawa Sari
  - 5). Desa Sungai Rambut.

**e. Penanganan Daerah Rawan Pangan.**

Kegiatan penanganan daerah rawan pangan secara umum bertujuan untuk:

1. Mencegah terjadinya rawan pangan
2. Menanggulangi kejadian rawan pangan transient
3. Meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat dalam mengatasi kejadian kerawanan pangan

Kegiatan Penanganan daerah rawan pangan dilakukan melalui :

Identifikasi daerah rawan pangan : secara teknis dilakukan oleh unit kerja yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota bersama instansi teknis lainnya.

Pemantauan : dilakukan oleh Tim Investigasi/aparat dari Badan Koordinasi Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi

Pembinaan : secara teknis dilakukan oleh unit kerja yang menangani ketahanan pangan di kabupaten/kota bersama Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Ditingkat lapangan dilakukan oleh Kepala BPP/Kacabdis dan Penyuluh Lapangan.



## **Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)**

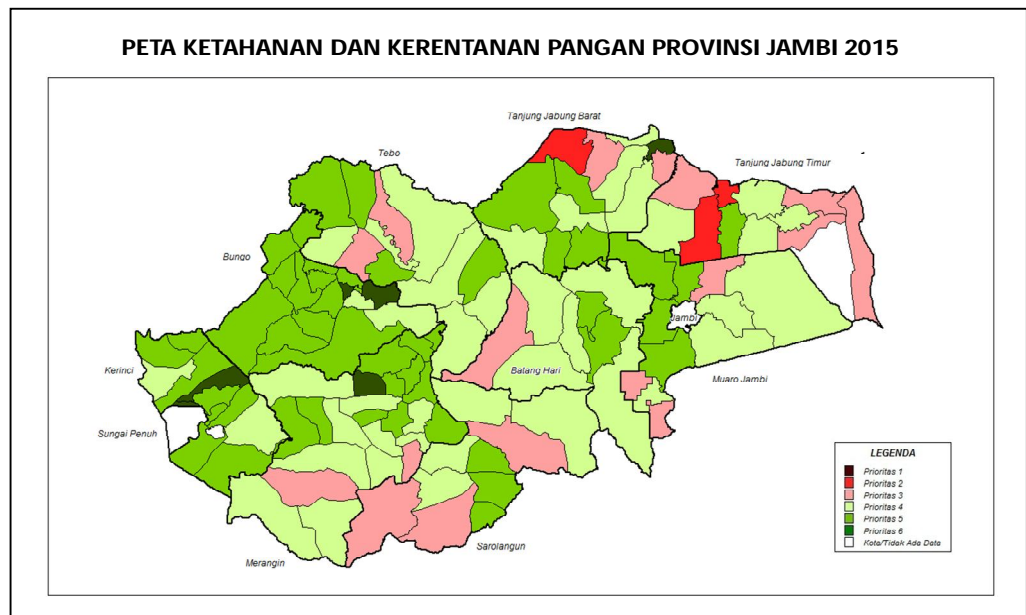
Bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit di tentukan berdasarkan 9 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit dibuat dengan menghitung Indeks Ketahanan Pangan Komposit (gabungan), dengan menggabungkan indikator-indikator yang bobotnya ditetapkan melalui Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis)

Berdasarkan peta komposit dapat dijelaskan bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu kabupaten di sebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Kemudian, dengan melihat seluruh peta individu maka dapat diidentifikasi penyebab utama kondisi kerawanan dan kerentanan pangan di suatu kabupaten. Dapat dipahami bahwa penyebab kerawanan dan kerentanan pangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya bervariasi, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Melalui peta dan laporan FSVA ini dapat membantu memahami perbedaan dan kesamaan dasar di antara kabupaten-kabupaten, dan dengan demikian akan membantu para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu paling kritis yang relevan untuk daerah masing masing.

Peta komposit menggambarkan kecamatan prioritas dalam kelompok gradasi warna merah yaitu merah tua (Prioritas 1), merah (Prioritas 2) dan merah muda (Prioritas 3). Kelompok warna merah tua menunjukkan kabupaten-kabupaten yang harus mendapat prioritas khusus dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan.

Pemetaan ini menggambarkan tingkat kemungkinan terjadinya kerawanan pangan suatu kecamatan secara relatif dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Dengan perkataan lain, kecamatan yang berwarna merah memiliki tingkat resiko kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan kecamatan yang berwarna hijau sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, Prioritas 1 (warna merah tua) tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan. Sebaliknya juga pada kabupaten di Prioritas 6 (warna hijau tua) tidak berarti bahwa semua penduduknya tahan pangan. (Seperti terlihat pada Peta dibawah ini).

## PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (FSVA) PROVINSI JAMBI TAHUN 2015



Dari hasil penghitungan indikator komposit dengan menggunakan metode Analisis Pembobotan Komposit pada 106 kecamatan di 9 kabupaten provinsi Jambi diketahui bahwa kecamatan yang termasuk pada klasifikasi prioritas 1,2,3 (kategori rentan terhadap kerawanan pangan) sebanyak 20 kecamatan (16,95%) dan prioritas 4,5,6 (kategori tahan pangan) sebanyak 98 kecamatan (83,05%). Berdasarkan komposit (gabungan) 9 (Sembilan) indikator diatas secara rinci klasifikasi masing-masing kecamatan menurut prioritas penanganan untuk Prioritas 1 dan 3 sebagai berikut :

1. **Prioritas 1 (Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan )** tidak terdapat di masing – masing Kecamatan.
2. **Prioritas 2 (Rentan Terhadap Kerawanan Pangan )** di 3 kecamatan (2,54%) pada 2 Kabupaten (Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Senyerang dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Geragai dan Kecamatan Kuala Jambi).
3. **Prioritas 3 (Cukup Rentan Terhadap Kerawanan Pangan)** di 17 Kecamatan (14,41 %) pada 7 Kabupaten (Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muara Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Tebo) yaitu :
  - 1). Kabupaten Merangin (2 Kecamatan) :
    - (1). Kecamatan Lembah Masurai
    - (2). Kecamatan Pemenang Selatan
  - 2). Kabupaten Sarolangun (3 Kecamatan) :
    - (1). Kecamatan Batang Asai

- (2). Kecamatan Limun
- (3). Kecamatan Pauh
- 3). Kabupaten Batang Hari (1 Kecamatan) :
  - (1). Kecamatan Maro Sebo Ulu
- 4). Kabupaten Muara Jambi (3 Kecamatan) :
  - (1). Kecamatan Bahar Selatan
  - (2). Kecamatan Bahar Utara
  - (3). Kecamatan Tanggo Rajo
- 5). Kabupaten Tanjung Jabung Timur (4 Kecamatan) :
  - (1). Kecamatan Mendahara
  - (2). Kecamatan Berbak
  - (3). Kecamatan Nipah Panjang
  - (4). Kecamatan Sadu
- 6). Kabupaten Tanjung Jabung Barat (2 Kecamatan) :
  - (1). Kecamatan Pengabuan
  - (2). Kecamatan Kuala Betara
- 7). Kabupaten Tebo (2 Kecamatan) :
  - (1). Kecamatan Rimbo Bujang
  - (2). Kecamatan Serai Serumpun

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan antara lain adalah Pelatihan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2016 yang dilaksanakan selama 3 (tiga) pada tanggal 18 s.d 20 April 2016 bertempat di Hotel Cosmo Jl. Sukarno-Hatta Nomor 7 Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang yang terdiri dari masing-masing Kabupaten 2 orang.

Materi dalam pertemuan pelatihan aparat pendamping lumbung pangan masyarakat sebagai berikut :

- 1. Penjelasan Umum tentang Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA).
- 2. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan.
- 3. Analisis Aspek Akses terhadap Pangan.
- 4. Analisis Aspek Pemanfaatan Pangan.
- 5. Analisis Kerentanan Pangan Sementara.
- 6. Penyusunan Ketahanan Pangan Komposit.

**f. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).**

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi adalah kegiatan yang bertujuan agar para pengambil keputusan dalam kebijakan dan program perbaikan pangan dan gizi dapat mengambil keputusan dan tindakan secara seksama, tepat waktu dan benar, informasi dan data akurat dikumpulkan secara terus menerus dan teratur harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyusun berbagai kegiatan, seperti peramalan, pemetaan situasi pangan dan gizi bagi peningkatan ketahanan pangan dan gizi penduduk. Artinya didalam SKPG informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dan analisis serta kesimpulan yang diambil sangatlah penting bagi para pengambil keputusan sebagai perencana pembangunan pangan dan gizi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi antara lain Pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 05 April 2016 bertempat di Hotel Cosmo Jl. Sukarno-Hatta Nomor 7 Kota Jambi dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari masing-masing 11 Kabupaten/Kota adalah 2 orang dan Provinsi 3 orang.

Adapun Materi dalam Pertemuan Penguatan Kapasitas Aparat dalam Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Permentan SKPG No 43 Tahun 2010.
2. Strategi Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) untuk pengambilan keputusan.
3. Analisis SKPG Bulanan.
4. Aspek Ketersediaan.
5. Aspek Akses.
6. Aspek Pemanfaatan

**2). Aspek Distribusi dan Harga Pangan, Hasil yang telah dicapai sebagai berikut ;**

**a. Stabilitas Kepastian Harga Primer (Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat/P-LDPM)**

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga agar harga pangan dapat stabil tidak terlalu bergejolak, sehingga diharapkan agar petani tidak dirugikan, terutama komoditi beras/gabah. Kegiatan yang telah dilakukan berupa pembinaan terhadap Gapoktan yang telah menerima

bantuan sosial (bansos) Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang telah berlangsung sejak tahun 2009.

Salah satu kegiatan penting dalam aspek distribusi pangan adalah pemantauan arus keluar masuk bahan pangan melalui kegiatan Jaringan Distribusi Bahan Pangan, terutama tiga komoditas yaitu beras, cabe merah, dan bawang merah yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Tahun 2016. Pemantauan ketiga komoditi ini merupakan yang berpengaruh terhadap inflasi bahan pangan di Provinsi Jambi. Sampai saat ini kegiatan ini belum dapat terlaksana secara maksimal, karena pemantauan ini melalui jalur koordinasi antar Instansi terkait terutama Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten/Kota. Lokasi pemantauan pada titik jembatan timbang, pos pengawasan bahan pangan di tingkat kabupaten/kota, pelabuhan sungai dan laut, serta pemantauan di pasar induk atau pasar terbesar di tingkat kabupaten/kota.

Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) yang saat ini terus dilaksanakan dalam bentuk perdagangan gabah/beras melalui kegiatan unit-unit usaha pemasaran dan distribusi. Sampai saat ini dana Bantuan Pemerintah untuk kegiatan P-LDPM ini berjumlah 35 (Tiga Puluh Lima) Gapoktan yang tersebar di 8 (Delapan) Kabupaten/Kota dengan jumlah dana lebih kurang Rp. 6,75 Miliar. Dana Bantuan Sosial P-LDPM ini disalurkan mulai tahun 2009 s/d 2016, yang mana tujuannya adalah untuk pemberdayaan Gapoktan dalam pengembangan usaha atau perdagangan gabah/beras, untuk stabilisasi harga gabah/beras di tingkat lapangan dan memupuk cadangan pangan pada tingkat Gapoktan atau wilayah.

Jumlah gapoktan penerima dana bansos P-LDPM sejak tahun 2009 hingga 2015 sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) gapoktan, dan pada Tahun 2016 ada penambahan 2 (Dua) gapoktan baru (tahap penumbuhan) penerima bansos P-LDPM, sehingga total gapoktan penerima bansos P-LDPM sampai dengan tahun 2016 menjadi **35 (Tiga Puluh Lima) gapoktan**. Adapun total gapoktan tersebut perkabupaten secara rinci disajikan pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Sebaran Gapoktan Penerima Dana Bansos Ketahanan Pangan 2009-2016.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Gapoktan Penerima
1	Tanjung Jabung Barat	7
2	Tanjung Jabung Timur	8
3	Kerinci	7
4	Sungai Penuh	6
5	Merangin	2
6	Sarolangun	2
7	Batang Hari	2
8	Muaro Jambi	1
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap 35 (Tiga Puluh Lima) gapoktan di atas pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penggunaan dana yang telah disalurkan pada Gapoktan tersebut sehingga gapoktan yang mendapatkan dana bansos memperoleh nilai tambah dari pengalokasian dana untuk pendistribusian pangan kepada anggota gapoktan.

**b. Analisis Harga Pangan Strategis**

Perkembangan harga pangan tingkat produsen periode Januari sampai dengan Desember 2016, cenderung stabil dengan koefisien variasi (CV) lebih kecil dari 10%, kecuali untuk komoditas bawang merah dan cabe merah dengan  $CV > 25\%$ . Fluktuasi harga cabe merah yang tinggi di tingkat produsen di temukan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Batang Hari, Bungo, Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Tanjung Jabung Timur. Sedangkan fluktuasi harga yang tinggi untuk Bawang merah hanya ditemukan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Perkembangan harga pangan ditingkat pedagang grosir periode Januari sampai dengan Desember 2016 relatif stabil dengan  $CV < 10\%$ , kecuali bawang merah dengan  $CV > 10\%$  dan cabe merah keriting dengan  $CV > 25\%$ . Demikian juga perkembangan harga pangan ditingkat pedagang eceran pada periode yang sama juga memperlihatkan fluktuasi yang sama.

Perkembangan Harga Pangan Di Tingkat Konsumen dan Produsen Provinsi Jambi Tahun 2016 sebagaimana terlihat pada Tabel 10 dan Tabel 11 berikut :

**Tabel 10. Perkembangan Harga Gabah, Jagung, Beras dan Cabe di tingkat Produsen Tahun 2016.**

No.	Komoditi	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Rata2	stdv	%cv
1	Gabah Kering Panen Petani	4,322	4,268	4,299	4,325	4,302	4,252	4,229	4,268	4,287	4,239	4,279	33	0.8
2	GKG Tingkat Penggilingan	5,537	5,239	5,217	5,191	5,309	5,139	5,052	5,130	5,116	5,039	5,197	146	2.8
3	Jagung Piliian Kering	3,136	2,888	3,050	2,890	3,007	2,992	2,888	2,873	3,001	3,101	2,983	95	3.2
4	Beras Medium	9,099	8,924	8,892	8,784	8,635	8,714	8,860	8,836	8,725	8,911	8,838	132	1.5
5	Cabe Merah	25,502	19,151	16,237	15,260	19,940	21,617	28,328	40,456	54,456	51,240	29,219	14,420	49.4

Pada periode Maret sampai dengan Desember perkembangan harga gabah, jagung dan beras di tingkat produsen cenderung stabil  $cv < 10\%$ , sedangkan untuk komoditi cabe merah berfluktuasi  $CV > 25\%$ .

Harga beras di tingkat produsen masih diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp.7.300/kg.

**Tabel 11. Perkembangan Harga di Tingkat Konsumen (Pengecer) Tahun 2016.**

No.	Komoditi	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des	Rata2	stdv	%cv
1	Jagung Pipilan Kering	6.374	6.321	6.102	6.143	6.156	6.130	6.076	6.230	6.283	6.346	6.216	109	1,8
2	Biji Kedelai Kering	9.608	9.612	9.225	9.575	9.834	9.863	9.763	9.735	9.694	9.810	9.672	186	1,9
3	Beras Medium	11.160	10.949	10.705	10.796	10.717	10.798	10.841	10.803	10.785	10.804	10.836	132	1,2
4	Beras Premium	12.650	12.400	12.154	12.442	12.155	12.397	12.427	12.266	12.274	12.303	12.347	149	1,2
5	Beras Termurah	9.301	9.216	9.143	9.296	9.230	9.258	9.221	9.131	9.178	9.361	9.233	73	0,8
6	Bawang Merah	34.054	35.115	34.876	33.145	34.474	32.883	32.265	31.206	31.350	28.435	32.780	2.059	6,3
7	Cabe Merah Keriting	45.215	26.008	21.750	23.026	29.163	32.050	38.978	51.673	69.842	57.935	39.564	16.236	41,0
8	Gula Pasir Lokal	12.450	12.349	13.416	14.497	14.862	14.780	14.409	14.170	13.846	13.640	13.842	893	6,4
9	Daging Ayam Ras	27.588	27.520	30.079	32.115	35.597	33.364	31.310	31.452	30.513	31.035	31.057	2.428	7,8
10	Telur Ayam Ras	19.947	19.879	20.001	21.283	21.335	21.645	21.778	21.630	22.533	22.941	20.000	1.065	5,3
11	Minyak Goreng	11.634	11.588	12.013	12.286	12.180	11.991	12.128	12.180	12.055	12.203	12.026	237	2,0
12	Tepung Terigu	8.172	8.373	8.477	8.663	8.633	8.566	8.555	8.529	8.598	8.283	8.485	160	1,9

Perkembangan Harga Pangan di Tingkat Pedagang Pengecer periode Maret sampai dengan Desember 2016 relatif stabil  $CV < 10\%$  : bawang merah  $CV < 10\%$ , daging ayam ras  $CV < 10\%$  dan kecuali cabe merah  $> 25\%$  ketiga komoditi ini mengalami fluktuasi harga yang signifikan.

Dari pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, cabe merah masih merupakan penyumbang inflasi di Provinsi Jambi naik turunnya harga cabe merah di pengaruhi oleh jumlah pasokan yang masuk ke pasar- pasar tradisional, dimana apabila pasokan membludak maka harga akan turun dan sebaliknya mengingat komodti ini merupakan komoditi yang tidak tahan disimpan lama.

**c. Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;**

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Pertemuan Sosialisasi Akses Pangan yang diselenggarakan di Provinsi Jambi pada tanggal 18 Juli 2016 bertempat di Kantor Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Jln. Samarinda Kotabaru – Jambi, dengan pesertanya adalah Kepala Badan/Kantor, Pejabat Eselon III atau IV yang mengelola Akses Pangan dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Adapun Materi yang disampaikan adalah ;

1. Kebijakan Program Ketahanan Pangan Oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
2. Kebijakan Akses Pangan tentang Perkembangan Akses Pangan Masyarakat dan Analisis Akses Pangan Masyarakat oleh Kepala Bidang Akses Pangan BKP Pusat.

**3). Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan, hasil yang telah dicapai sebagai berikut ;**

**a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Kondisi konsumsi pangan penduduk provinsi Jambi selama beberapa tahun belakangan mengalami perubahan setiap tahunnya. Namun demikian masih terlihat bahwa sumber energi masih didominasi oleh bahan pangan asal beras (padi-padian), yaitu lebih dari 50 %.

Berbagai upaya telah dilakukan guna meningkatkan kualitas konsumsi pangan telah memperlihatkan hasilnya, walaupun belum optimal yang dicerminkan oleh kualitas konsumsi tersebut. Untuk mengetahui kualitas konsumsi pangan penduduk berdasarkan atas skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan skor PPH ini selalu berubah dari tahun ke tahun.

Adapun skor PPH Provinsi Jambi dari tahun 2009 – 2016 dapat dilihat pada tabel 12 berikut :

Tabel 12. Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jambi Tahun 2009-2016.

No	Tahun	Skor PPH
1	2009	75,3
2	2010	86,0
3	2011	89,3
4	2012	89,7
5	2013	83,3
6	2014	83,4
7	2015	85,9
8	2016	Data keluar pada tahun 2017



Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa target skor PPH Tahun 2016 yakni 90% dari 95 (sesuai target SPM) = 90,25 kemungkinan besar sulit tercapai.

**b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Diversifikasi Pangan antara lain :

- a. Sosialisasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman di 11 (Sebelas) Kabupaten/ Kota
- b. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Alokasi Dana Bansos/ Bantuan Pemerintah untuk kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan kepada kelompok wanita dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah Kelompok KRPL/P2KP 2010 – 2016 : 361 (Tiga Ratus Enam Puluh Satu) kelompok.
- b. Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016 telah dialokasikan Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp. 10.000.000.- per kelompok, untuk Pemanfaatan Pekarangan pada Tahun 2016 ini diperuntukkan bagi 62 kelompok KRPL Tahap Penumbuhan (Tahun 2015) yang mana saat ini memasuki Tahap Pengembangan, dan dari 62 (Enam Puluh Dua) Kelompok hanya ada 1 (Satu) kelompok yang tidak dapat dicairkan dikarenakan kelompok tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi yaitu di Kabupaten Bungo.
- c. Dana bantuan tersebut telah dimanfaatkan dengan peruntukan sebagai berikut:

Kebun Bibit Desa	Rp. 2.000.000,-
Pekarangan Anggota	Rp. 6.000.000,-
Demplot	Rp. 1.000.000,-
Peralatan Pengolahan Pangan Lokal	Rp. 1.000.000,-

**c. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ketahanan Pangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat dalam pengembangan ketahanan pangan, khususnya dalam kreasi cipta menu khas daerah. Untuk itu telah dilaksanakan kegiatan Lomba Cipta Menu baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.

Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi telah dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2016 (25 Mei 2016) di Gedung Olah Seni (GOS) Kota Jambi, dari lomba tersebut telah diperoleh pemenang I yakni Tim Penggerak PKK Kab. Tanjab Barat dan berhak untuk mewakili Provinsi Jambi untuk ikut Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional pada tahun 2017 mendatang.

Lomba Cipta Menu Tingkat Nasional dilaksanakan pada Bulan Oktober 2016 (28 Oktober 2016) di Boyolali Jawa Tengah, dan Provinsi Jambi mendapat Juara untuk Kategori Cita Rasa yang diwakili oleh Tim Penggerak PKK Kota Jambi.

**d. Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dan Regional**

Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yakni:

- a. Pada event Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi yang ke-59 Tahun 2016 di Kota Jambi pada tanggal 6 – 10 Januari 2016.
- b. Pada saat peringatan Hari Krida Pertanian Tingkat Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjab Timur.

Sedangkan Pameran Ketahanan Pangan Tingkat Nasional dilaksanakan di Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah pada Bulan Oktober 2016 (27 s.d 30 Oktober 2016) bertepatan dengan peringatan Hari pangan Sedunia Tahun 2016.

**e. Penanganan Keamanan Pangan.**

Kegiatan ini bertujuan untuk menangani keamanan pangan khususnya pangan segar, dan telah dilakukan beberapa sub kegiatan diantaranya ;

1. Promosi Pangan Segar Aman Konsumsi.  
Bentuk kegiatan yakni promosi tentang pangan segar yang aman dikonsumsi seperti buah dan sayuran yang telah diberi label Prima 3. Promosi dilakukan melalui media massa elektronik, leaflet dan mengikuti pameran pada event tertentu di tingkat provinsi.
2. Outlet Pangan Segar Aman Konsumsi Prima 3;  
Kegiatan Outlet Pangan Segar Aman Konsumsi Prima 3 merupakan kegiatan lanjutan tahun-tahun sebelumnya. Ada 3 (tiga) outlet Pangan Segar Aman Konsumsi Prima 3 yang telah dibentuk oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang terletak di :
  - 1). Pasar Induk Angso Duo Jambi
  - 2). Pasar Moderen Kebun Handil Kota Jambi
  - 3). Pasar Tradisional Villa Kenali.

Dana yang disalurkan digunakan untuk; sewa gedung/tempat, listrik, kebersihan dan keamanan selama 1 (satu) tahun.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai akhir Desember 2016 cukup baik dan berjalan lancar, petani / kelompok tani yang bersangkutan merasakan manfaat yang besar dari kegiatan outlet ini.

**f. Penurunan Konsumsi Beras (Kg/Kap/Tahun).**

Untuk menurunkan konsumsi beras kg/kapita/tahun, telah banyak upaya dan kegiatan yang telah dilakukan antara lain sosialisasi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman atau yang dikenal dengan singkatan B2SA, Promosi Pangan Lokal, Lomba Cipta Menu, Kader Pangan dan Analisis Pola Konsumsi Pangan, dengan harapan agar terjadi penurunan konsumsi beras.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, telah diperoleh gambaran jumlah konsumsi beras penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2009 – 2016, sebagaimana terlihat pada tabel 13 berikut:

Tabel.13. Konsumsi Beras Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009-2016.

No	Tahun	Konsumsi Beras (Kg/Kap/Tahun)
1	2009	99,2
2	2010	101,1
3	2011	104,2
4	2012	100,0
5	2013	93,0
6	2014	94,3
7	2015	84,4
8	2016	Masih dalam proses

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terlihat adanya penurunan konsumsi beras penduduk 10,5% per tahun.

**g. Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Tahun).**

Target konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yakni minimal 2.000 kkal/kap/hari. Berdasarkan data hasil kajian Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi dari Tahun 2009 – 2016 dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada tabel 14 berikut:

Tabel 14. Konsumsi Energi Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009- 2016.

No	Tahun	Konsumsi Energi (kkal/kap/hari)
1	2009	1.904
2	2010	2.127
3	2011	2.158
4	2012	2.090
5	2013	1.958
6	2014	1.977,1
7	2015	2.121,9
8	2016	Masih dalam proses

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa konsumsi energi penduduk Provinsi Jambi sudah sesuai dengan yang ditargetkan yakni minimal 2.150 kkal/kap/hari.

**h. Konsumsi Protein (gram/kap/hari).**

Target konsumsi protein penduduk Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yakni minimal 57,0 gram/kap/hari. Berdasarkan data hasil kajian Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, konsumsi protein penduduk Provinsi Jambi dari Tahun 2009 – 2016 dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada tabel 15 berikut:

Tabel 15. Konsumsi Protein Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2009 – 2016.

No	Tahun	Konsumsi Protein (gram/kap/hari)
1	2009	51,5
2	2010	58,2
3	2011	60,4
4	2012	57,7
5	2013	54,6
6	2014	54,0
7	2015	59,7
8	2016	Masih dalam proses

Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa konsumsi protein penduduk Provinsi Jambi sudah sesuai dengan yang ditargetkan yakni minimal 57 gram/kap/hari.

4). **Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.**

Berdasarkan Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010, Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota, masing-masing mempunyai indikator tersendiri sebagai berikut :

1. SPM PROVINSI (4 Indikator) :

No.	Jenis Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan	SPM		Capaian
		Indikator	Nilai (%)	
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan.	1. Penguatan Cadangan Pangan.	60	2016
2	Distribusi dan Akses Pangan.	2. Ketersediaan Informasi Pasokan Harga, dan akses pangan di daerah.	100	2016
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan.	3. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	80	2016
4	Penanganan Kerawanan Pangan.	4. Penanganan daerah rawan pangan.	60	2016

2. SPM KABUPATEN / KOTA (7 Indikator) :

No.	Jenis Pelayanan Dasar Ketahanan Pangan	SPM		Capaian
		Indikator	Nilai (%)	
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan.	1. Ketersediaan energi dan protein per kapita.	90	2016
		2. Penguatan Cadangan Pangan.	60	
2	Distribusi dan Akses Pangan.	3. Ketersediaan Informasi Pasokan Harga, dan akses pangan di daerah.	90	2016
		4. Stabilitas harga dan pasokan pangan.	90	
3	Penganekaragaman dan keamanan pangan.	5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH).	90	2016
		6. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.	80	
4	Penanganan Kerawanan Pangan.	7. Penanganan daerah rawan pangan.	60	2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013, target pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk masing-masing pelayanan dasar disajikan pada tabel 16 berikut, namun mengingat Pergub baru disahkan Tahun 2013, maka target yang disajikan yakni tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016:

Tabel 16. Target Pencapaian SPM Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Tahunan			
			2013	2014	2015	2016
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan cadangan pangan	50 %	55 %	60 %	60 %
2.	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.	70 %	85 %	100 %	100 %
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	60 %	70 %	80 %	80 %
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan daerah rawan pangan	50 %	55 %	60 %	60 %

Sedangkan Realisasi Capaian SPM Ketahanan Pangan selama 4 (empat) Tahun terakhir (2013, 2014, 2015 dan 2016) dapat dilihat pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Realisasi Capaian SPM Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Hasil Capaian (%)			
			2013	2014	2015	2016
1.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Penguatan cadangan pangan	70 Ton (35%)	90 Ton (45%)	0 Ton	0 Ton
2.	Distribusi dan Akses Pangan	2. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah.	97,53	97,53	97,53	97,53
3.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.	63,64	60,37	65,00	100
4.	Penanganan Kerawanan Pangan	3. Penanganan daerah rawan pangan	41,04	41,04	41,04	45,75

Berdasarkan Tabel 17 diatas dapat diuraikan capaian SPM Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sesuai dengan jenis pelayanan dan indikatornya sebagai berikut :

1). **Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan.**

Pada indikator Penguatan Cadangan Pangan, target Cadangan Pangan Pemerintah untuk Tingkat Provinsi yakni sebanyak 200 ton setara beras (sesuai dengan SPM Badan Ketahanan Pangan Kementerian RI). Dan untuk tahun 2015 Cadangan Pangan Pemerintah yang harus dicapai yaitu sebesar 60% dari 200 ton, atau sebesar 120 ton setara beras. Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa Cadangan Pangan selama 2 (dua) tahun terakhir (2013 dan 2014) baru mencapai 90 ton yaitu 70 ton (35%) pada tahun 2013 dan tahun 2014 sebanyak 20 ton, sedangkan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak ada penambahan Cadangan Pangan.

Hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2016 tersebut masih belum sesuai dengan yang diharapkan, baru 45% dari target 60%. Kekurangan 15% tetap akan diupayakan pada tahun-tahun mendatang. Penggunaan Cadangan Pangan sampai dengan Tahun 2016 sebanyak **32.102,5 kg** beras untuk membantu masyarakat rawan pangan di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Batanghari, Sarolangun dan Tanjung Jabung Barat, Bungo dan Merangin sehingga stok cadangan pangan pemerintah Provinsi di Gudang Perum Bulog per 31 Desember 2016 sebesar **57.897,5 kg** beras.

## **2). Pelayanan Distribusi dan Akses Pangan.**

Indikator dalam pelayanan distribusi dan akses pangan yakni ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah, capaian Tahun 2013 – 2016 sebesar 97,53 % dari target 100%. Sebagai gambaran dalam capaian indikator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan yakni sebagai berikut :

- a. Komoditas yang dipantau untuk harga dan pasokan yakni sebanyak 9 komoditas sedangkan untuk akses pangan hanya 7 komoditas dari sebanyak 9 komoditas yang ditargetkan. Nilai capaiannya 92,59%.
- b. Lokasi untuk melakukan pemantauan harga, pasokan dan akses pangan sesuai dengan yang ditargetkan yakni 1 lokasi untuk pemantauan harga dan pasokan, dan 7 lokasi untuk akses pangan. Nilai capaiannya 100%.
- c. Waktu pemantauan harga, pasokan dan akses pangan yakni selama 52 minggu dan ini sesuai dengan yang ditargetkan sehingga nilai capaiannya 100%.

Nilai capaian yakni jumlah capaian keseluruhan dibagi 3 sehingga rumusnya menjadi sebagai berikut :

$$( 92,59\% + 100\% + 100\% ) / 3 = 97,53\%.$$

## **3). Pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan.**

Indikator pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan untuk Tingkat Provinsi yaitu, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, yang mana target capaian sesuai SPM sebesar 80% sampel aman dikonsumsi pada Tahun 2016.

Capaian Tahun 2013 baru sebesar 63,64% (jumlah sampel 55 sampel, dan jumlah sampel yang tidak terdeteksi residu pestisida sebanyak 35 sampel). Tahun 2014 sebesar 60,37% (Jumlah sampel 53

sampel, dan jumlah sampel yang tidak terdeteksi residu pestisida sebanyak 32 sampel). Tahun 2015 persentase sampel aman konsumsi yakni sebesar 65% (Jumlah sampel 40 sampel, dan jumlah sampel aman sebanyak 26 sampel).

Sedangkan Tahun 2016 persentase sampel aman konsumsi sebesar 100 % (Jumlah sampel 10 sampel, dan jumlah sampel aman sebanyak 10 sampel). Hasil ini belum mewakili untuk Provinsi Jambi, karena jumlah sampel terlalu sedikit.

Berdasarkan Capaian Tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 tersebut dapat dilihat bahwa capaian SPM indikator pengawasan dan pembinaan keamanan pangan sampai dengan Tahun 2016 mencapai 100% dari target 80% pada Tahun 2016.

Untuk itu di Tahun-tahun mendatang masih banyak yang harus dilakukan diantaranya sosialisasi kepada masyarakat, anak-anak sekolah mengenai pentingnya pangan yang aman untuk dikonsumsi, melakukan pengujian terhadap produk pangan baik pangan segar maupun pangan olahan. Jumlah sampel yang diuji juga perlu diperbanyak, mengingat semakin banyaknya sampel yang diuji akan semakin mendekati keakuratan data yang diperoleh.

#### **4). Pelayanan Penanganan Kerawanan Pangan**

Indikator yang digunakan untuk pelayanan penanganan daerah rawan pangan yaitu banyaknya desa rawan pangan yang dapat ditangani dibanding jumlah desa yang mengalami kerawanan pangan.

Di Provinsi Jambi melalui Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah dilaksanakan Kegiatan Penanganan Daerah / Desa yang mengalami Kerawanan Pangan, namun sampai dengan saat ini belum optimal dalam penanganannya dikarenakan Keterbatasan Dana yang ada. Sebagai gambaran bahwa hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2014 yakni dari 212 desa yang beresiko rawan pangan (data tahun 2009) sampai Tahun 2015 baru 87 desa yang telah diberdayakan dalam bentuk Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan penambahan 10 desa tahap persiapan, sehingga pada Tahun 2016 ini memasuki tahap penumbuhan sehingga total sampai saat ini telah menjadi 97 desa. Sehingga secara keseluruhan Penanganan Kerawanan Pangan baru tercapai sebesar 45,75%, karena sejak tahun 2013 tidak ada lagi penambahan Desa Mandiri Pangan yang baru.



5). **Aspek Manajemen Ketahanan Pangan.**

a. **Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan**

Kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan merupakan kegiatan yang cukup strategis karena merupakan salah satu media untuk berkoordinasi dengan segenap dinas/instansi lingkup Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain ;

1. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode I Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016 bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Provinsi Jambi yang diikuti oleh anggota Dewan Ketahanan Pangan baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi. Dari rapat Koordinasi ini telah diperoleh berupa Rumusan Hasil dan telah disampaikan ke masing-masing Kabupaten/Kota.
2. Sedangkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode II Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi dan keadaan anggaran yang ditunda/ diblokir serta adanya pemotongan anggaran pada kegiatan Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Periode II, dan untuk memaksimalkan kegiatan dengan keterbatasan anggaran tersebut hanya dapat dilaksanakan Rapat Koordinasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diikuti oleh perwakilan Sekretaria Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota pada tanggal 22 Desember 2016 bertempat di Ruang Aula Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, guna mendapatkan/ memperoleh data dan Hasil Rumusan untuk Semester II, yang kemudian akan disampaikan ke Kabupaten/ Kota.

b. **Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program Peningkatan Ketahanan Pangan.**

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Rencana dan Merumusan Program Ketahanan Pangan untuk 1 (satu) Tahun kedepannya, Kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. **Pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Ketahanan Pangan Tahun 2017**

Telah dilaksanakan Pertemuan Musrenbang Ketahanan Pangan Tahun 2017 selama 2 (dua) hari, pada tanggal 16 s.d 17 Maret 2016, bertempat di Rumah Kito Resort Hotel, Komplek Puri Mayang Jl. Serma Ishak Ahmad RT. 26 Mayang Mangurai Kota Jambi, dengan jumlah peserta dan panitia sebanyak 53 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Peserta Kab/Kota : 33 Orang
- Peserta Provinsi : 4 Orang
- Narasumber : 7 Orang
- Moderator : 4 Orang
- Panitia : 5 Orang

Adapun materi yang disampaikan adalah :

- (1). Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2017 (Bappeda Provinsi Jambi).
- (2). Rencana Kegiatan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2017 dan Teknik Pengusulan melalui E-Proposal (BKP Kementan RI)
- (3). Mekanisme dan Aturan Penyusunan Rencana Kegiatan Ketahanan Pangan (Kepala BKP Provinsi Jambi)
- (4). Rencana Kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan TA. 2017 Dana APBN/APBD I (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan)
- (5). Rencana Kegiatan Bidang Distribusi dan Harga Pangan TA. 2017 Dana APBN/APBD I (Kabid Distribusi dan Harga Pangan)
- (6). Rencana Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan TA. 2017 Dana APBN/APBD I (Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan)
- (7). Perumusan Hasil Musyawarah dan Pemantapan Usulan serta penandatanganan oleh wakil masing-masing Kabupaten/Kota.

## **2. Pertemuan Sinkronisasi Operasional Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2016**

Telah dilaksanakan Pertemuan Sinkronisasi Operasional Kegiatan Tahun 2016 selama 2 (dua) hari, pada tanggal 15 s.d 16 Maret 2016, bertempat di Rumah Kito Resort Hotel, Komplek Puri Mayang Jl. Serma Ishak Ahmad RT. 26 Mayang Mangurai Kota

Jambi, dengan jumlah peserta dan panitia sebanyak 52 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Peserta Kab/Kota : 33 Orang
- Peserta Provinsi : 4 Orang
- Narasumber : 6 Orang
- Moderator : 4 Orang
- Panitia : 5 Orang

Adapun materi yang disampaikan adalah :

- (1). Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi TA. 2016 (BKP Kementan RI).
- (2). Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan APBN dan APBD TA. 2016 (Kepala BKP Provinsi Jambi).
- (3). Teknis dan Scedul Pelaksanaan Kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan).
- (4). Teknis dan Scedul Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan (Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan).
- (5). Teknis dan Scedul Pelaksanaan Kegiatan Bidang Distribusi dan Harga Pangan (Kabid Distribusi dan Harga Pangan).
- (6). Pemantapan ROPAK Dekonsentrasi TA. 2016

**c. Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan**

Kegiatan ini bertujuan untuk memantau/memonitor serta Mengevaluasi Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan selama tahun berjalan, dan telah dilaksanakan Pemantauan dan Pembinaan ke Kabupaten/ Kota terkait Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan di lokasi.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, dan untuk Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Ketahanan Pangan yang direncanakan pada bulan Juli 2016 tidak dilaksanakan dikarenakan kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan dan penundaan jadwal pelaksanaan pertemuan sehingga pada akhirnya anggaran ditunda/ diblokir serta adanya pemotongan anggaran pada kegiatan tersebut.

Untuk memaksimalkan kegiatan hanya dilakukan Monitoring dan Evaluasi Akhir dengan dukungan Dana Dekonsentrasi APBN TA. 2016 yang telah dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 28 s.d 30 Nopember 2016 bertempat di Odua Weston Hotel Jl. Gatot Subroto No. 57 Kota Jambi, dengan peserta sebanyak 35 orang yang terdiri dari :

- Peserta Kab/Kota : 22 Orang
- Peserta Provinsi : 10 Orang
- Panitia : 3 Orang

Dengan Materi sebagai berikut :

1. Paparan Capaian Kinerja Lingkup BKP TA. 2016 dan Rencana Kegiatan TA. 2017.
2. Paparan Hasil Evaluasi Program Ketahanan Pangan Secara Nasional dan Provinsi Jambi.
3. Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan TA. 2016
4. Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Bidang Konsumsi dan Strategi Percepatan.
5. Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Bidang Ketersediaan dan Strategi Percepatan.
6. Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan Bidang Distribusi dan Strategi Percepatan.
7. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan dan Rumusan.

**d. Penyusunan Database Statistik Ketahanan Pangan.**

Telah dilaksanakan Kegiatan Penyusunan Database / Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2016, dengan rincian kegiatan antara lain adalah; Pengumpulan Data sebanyak 2 (dua) kali, Pemberian Transport Petugas Statistik Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, Penggandaan Buku Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2015.

### III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi pada tahun 2018 yaitu **1 program utama, 6 program pendukung dengan 13 kegiatan utama** yang terurai sebagai berikut :

#### 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Program Utama)

**Tujuan** : Program Peningkatan Ketahanan Pangan bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan Ketahanan Pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

**Sasaran** :

- a. Stabilisasi ketersediaan pangan di tingkat wilayah.
- b. Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- c. Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat
- d. Terbangunnya kesadaran aparat, petani dan swasta dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan.

**Kegiatan** :

1. Kegiatan Penyusunan Data Base/ Laporan Kondisi Ketahanan Pangan.
2. Kegiatan Koordinasi Ketahanan Pangan.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Pangan.
4. Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Perumusan Program.
5. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pangan Desa.
6. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Daerah.
7. Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Pangan.
8. Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintahan Daerah.
9. Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok.
10. Kegiatan Pengembangan Distribusi Pangan.
11. Kegiatan Peningkatan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat.
12. Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan.
13. Kegiatan Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Daya Lokal.

## **2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat- Menyurat.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
6. Kegiatan Penyediaan Alat tulis Kantor.
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
8. Kegiatan Penyediaan Instalasi Komp. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman.
11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

## **3. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk memenuhi pelayanan administrasi kantor yang kegiatannya meliputi :

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
2. Kegiatan Pengadaan Mebeleur.
3. Kegiatan Pengadaan Komputer.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional.
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala perelengkapan gedung kantor.
7. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.
8. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

## **4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur yang ada pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang kegiatannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

## **5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur yang kegiatannya meliputi Pendidikan dan Pelatihan Formal.

**6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan bertujuan untuk meningkatkan penyusunan Laporan Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

#### IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Untuk melakukan pengukuran kinerja digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja pada tingkat **sasaran** yang merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator kinerja pada tingkat **kegiatan** yang terdiri dari :
  - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
  - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
  - c. Indikator outcomes (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
  - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
  - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Mengingat indikator benefit dan impact belum dapat diukur dalam waktu yang singkat (satu) tahun, maka dalam penyusunan Rencana Kerja ini untuk pengukuran indikator kegiatan hanya dilakukan pada indikator input, output dan outcome.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi telah menyusun indikator kinerja yang akan dicapai di tahun 2018 terutama dalam pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana yang telah dituangkan dalam Permentan nomor 65/Per mentan/OT.140/12/2010. Adapun indikator standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan tersebut sebagai berikut :

1. Terlaksananya pemberdayaan penduduk beresiko rawan pangan di desa Mandiri Pangan;
  - a. Target : Penduduk rawan pangan berkurang 1% per tahun.
2. Tersedianya energi minimal 2.200 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari;
  - Target : Minimal energi tersedia 2.200 kkal/kap/hari dan protein sebesar 57 gram/kap/hari.



- Target : Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar 30 ton beras.
3. Menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5%/kap/tahun, diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian dalam pemenuhan karbohidrat.
    - Target : Skor PPH 95
  4. Tercapainya pola konsumsi pangan masyarakat per kapita dalam memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kkal/kap/hari dan protein sebesar 52 gram/kap/hari.
    - Target : minimal 2.000 kkal/kap/hari, protein 52 gram/kap/hari.
  5. Semakin baik sistem distribusi pangan sehingga mampu menjaga harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat dengan fluktuasi harga kurang dari 25% dari harga normal dari suatu wilayah.
    - Target : fluktuasi harga < 25%.
    - Target : tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah.
  6. Meningkatnya perbaikan penanganan pangan dalam mewujudkan pangan yang aman untuk dikonsumsi melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumen.
    - Target : 11 kabupaten/kota.
  7. Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan.
    - Target : adanya dokumen kebijakan ketahanan pangan.

## **V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Kebutuhan dana indikatif, sumber dana serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dari masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat secara rinci pada Lampiran dalam Renja ini.

## **VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018 ini, sumber dana yang dibutuhkan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi dan Dana Dekonsentrasi (APBN) dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

## VII. PENUTUP

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan untuk mewujudkan Jambi Tuntas 2021, tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018 akan diwujudkan melalui program / kegiatan prioritas meliputi aspek :

1. Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
3. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.
4. Kegiatan Pendukung.

Disadari bahwa untuk mencapai pembangunan ketahanan pangan tidaklah mudah, namun dengan tekad dan kerjasama lingkup ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten / Kota se Provinsi Jambi, serta koordinasi dengan Eselon I Pusat dan Instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan, akan dapat tercapai tujuan dan sasaran pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jambi.

Demikian, rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2018 ini disusun dengan harapan agar tercapai kondisi ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

# LAMPIRAN